

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu hasil pertanian yang memberikan manfaat bagi subsektor perkebunan Indonesia adalah tanaman karet, baik secara nasional maupun internasional. Karet merupakan salah satu barang perkebunan yang penting sebagai sumber pendapatan, sebagai peluang untuk bekerja, sebagai sumber devisa negara, sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi di sentra-sentra baru di sekitar perkebunan karet, serta melestarikan lingkungan dan sumber daya hayati (Departemen Pertanian, 2007).

Pendapatan yang diraup petani di Desa Rimba Ukur dari aktivitas produksi karet berasal dari jumlah lateks yang dipanen setiap hari. Lateks yang dijual kepada pembeli yaitu berbentuk lump (latek yang sengaja dibuat membeku berwujud bantalan karet). Saat peneliti melakukan pra-observasi para petani mengungkapkan bahwa nilai jual karet berbeda-beda akan tetapi jika mengacu pada harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah yaitu Rp. 14.000/kg. Sementara itu, masyarakat menjualnya ke tengkulak serta kelompok dengan harga yang jauh dari semestinya, tengkulak mematok harga Rp. 11.000-/kg sementara pengumpul Rp. 9500kg/kg.

Masalah utama karet adalah harga yang merupakan harga jual produk karet yang tidak stabil dan cenderung turun. Harga jual yang muncul di pasar internasional sebenarnya merupakan masalah yang tidak hanya dihadapi oleh barang karet, tetapi juga semua barang pertanian. Sebagian besar produksi

karet alam Indonesia digunakan untuk tujuan ekspor, sehingga harga karet dalam negeri sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh perubahan harga karet luar negeri. Krisis ekonomi yang melanda banyak negara membuat permintaan dan konsumsi karet alam dunia melemah. Kriteria perkembangan harga karet di luar negeri adalah harga yang berlaku di berbagai bursa komoditas karet luar negeri, seperti Singapura, London dan New York (Tim Penulis, 2009).

Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berperan dalam meningkatkan devisa negara sebagai pemasok barang-barang karet. Kontribusi provinsi Sumatera Selatan terhadap produksi karet sangat bermanfaat bagi negara Indonesia, selain itu juga dapat memberikan banyak lapangan pekerjaan khususnya bagi masyarakat Sumatera Selatan. Dari sektor pertanian karet di Sumsel, sebanyak 444.000 keluarga di Sumsel mencoba menanam karet skala kecil, yang berarti menutupi kehidupan ekonomi sekitar 1,8 juta orang di Sumsel. Luas wilayah Kabupaten Musi Banyuasin telah mencapai 53.891 Ha dengan produksi 103.024 (Badan Statistik Sumatra Selatan, 2018-2020).

Desa di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani karet adalah Desa Rimba Ukur. Selain itu, petani di Desa Rimba Ukur ini juga merasakan penurunan harga karet yang terjadi saat ini, sehingga berdampak pada pendapatan serta daya beli petani-petani di Desa Rimba Ukur tersebut.

Maksud dan tujuan negara Indonesia, serta cita-cita bernegara, tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, guna mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk perlindungan semua orang. Indonesia. Bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam menegakkan ketertiban. Dunia yang berdasarkan kebebasan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara memerlukan pemerintah untuk menentukan kebijakan tujuan negara, yaitu pemerintah sebagai penguasa memutuskan sistem yang berupa kebijakan pemerintah (public policy) kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat banyak.

Anwas (2013:4) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pembangunan, ketika masyarakat berinisiatif memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi mereka. Selain itu, pemberdayaan juga pada intinya merupakan proses yang memberdayakan masyarakat. Setiap anggota masyarakat sebenarnya memiliki potensi, gagasan dan kemampuan untuk mengarahkan diri dan masyarakatnya ke arah yang lebih baik, namun terkadang potensi tersebut tidak dapat dikembangkan karena faktor-faktor tertentu. Untuk mengembalikan otonomi masyarakat dalam pembangunan masyarakatnya, perlu didorong atau digagas ide-ide untuk menghidupkan kembali peran dan kedudukan inspirator dalam membangun masyarakat yang sejahtera.

Kemiskinan ini disebabkan oleh faktor eksternal yang sangat penting, yaitu sistem pemasaran produk karet yang lebih menguntungkan tengkulak dan menimbulkan biaya yang tidak menguntungkan bagi pengangkut karet. Dan masih kurangnya pengetahuan atau kesadaran tentang pengelolaannya yang mengakibatkan karet yang dihasilkan kualitasnya lebih rendah, dan sistem pemasarannya harus melalui sistem perantara. Sehingga hasil yang diperoleh tidak dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Meskipun desa Rimba Ukur hanya salah satu penghasil karet terbesar setelah desa Sinta Karya di wilayah Sekai, kenyataannya tidak semua petani hidup dalam kondisi yang lebih baik, banyak dari mereka yang masih kurang sejahtera.

Hal ini disebabkan karena biaya yang dikeluarkan tidak efektif, karena perbandingan harga karet tidak sesuai dengan yang seharusnya, yang membuat sebagian produsen karet di wilayah studi merasa rugi jika melihat perbandingan yang dilakukan sebelumnya. Pemerintah. Selain itu, kesadaran petani tentang pengelolaan karet dan akses jalan yang rusak sejak 2009 belum juga membaik. Banyak dari mereka tidak dapat hidup dengan baik karena kebutuhan keluarganya melebihi pendapatan yang mereka terima dari menjual karet. Mengejutkan bahwa sektor pertanian yang merupakan konsumen tenaga kerja terbesar dan tempat sebagian besar masyarakat menggantungkan harapan hidup, terutama di pedesaan, sudah menghadapi masalah, terutama di desa Rimba Ukur. Permasalahan tersebut antara lain keuntungan petani karet, kurangnya kesadaran masyarakat petani karet dan akses jalan yang rusak, dan sektor serupa menghadapi masalah terkait dengan buruknya kesejahteraan

petani, terutama petani karet. Kesejahteraan petani merupakan tujuan pembangunan pertanian dan nasional, yang merupakan perjuangan setiap keluarga untuk mencapai kesejahteraan anggotanya.

Berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2019 kesejahteraan sosial merupakan sebuah keadaan yang mana segala keperluan materi, spiritual, dan juga sosial dari setiap warga pada sebuah negara terpenuhi, dengan demikian mereka bisa mendapatkan kehidupan yang selayaknya serta bisa meningkatkan kualitas diri dengan demikian fungsi sosial dari setiap warga dapat terlaksana dengan baik. Suharto (2004) menyatakan bahwa kesejahteraan sosial merupakan sebuah keadaan yang mana seseorang hidup dalam kondisi sejahtera yaitu terpenuhinya kebutuhan Jasmani, Rohani, serta sosial nya. Kesejahteraan kerap dimaknai dengan keadaan sejahtera yaitu sebuah kondisi di mana keperluan mendasar seseorang dapat terpenuhi diantaranya makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, serta kesehatan. Kesejahteraan ialah akhir dari sebuah tujuan dari adanya serangkaian kegiatan pembangunan pada daerah tertentu. Dalam sebuah rumah tangga dapat dikatakan sejahtera jika terpenuhi indikator yang menjadi tolak ukur kesejahteraan yaitu pendapatan, termasuk dalam hal ini rumah tangga petani karet.

Pada masa mendatang perkaretan dunia dapat diprediksi akan meningkat dengan baik maka dari itu semakin tingginya kesadaran akan kondisi yang baik ada banyak pabrik ban yang dapat dilihat di dunia saat ini yang mulai mengenalkan ban "Green Lyres" yang memiliki kandungan karet lebih besar (dari 30-40% jadi 60-80%). Di samping hal tersebut sejumlah perusahaan yang

bergerak dibidang industri polimer yang memanfaatkan karet alam sebagai bahan baku diprediksi juga akan mengalami peningkatan seiring dengan berkurangnya berbagai sumber ladang minyak di bumi serta batu bara, kompetisi di antara karet alam dengan keberadaan produk substitusi diprediksi akan mengalami penurunan (Ditjenbun, 2007).

Salah satu hasil dari perkebunan yang dapat dijadikan sebagai sumber kehidupan bagi 1,6 jt keluarga petani adalah dari perkebunan karet. Selain jadi sumber penghidupan, perkebunan karet juga bisa bermanfaat sebagai sumber devisa paling besar nomor dua sesudah perkebunan kelapa sawit serta dapat dijadikan sebagai lapangan kerja dan salah satu hasil perkebunan yang mana pasokannya dapat dimanfaatkan untuk berbagai produksi industri dalam negeri (Ditjenbun, 2007)

Peneliti menemukan sebuah cerita yang menginspirasi berkenaan dengan persoalan ini yaitu peran pemerintah Desa Rimba Ukur, secara umum kondisi dan geografis kepenghuluan Rimba Ukur juga memiliki karakteristik yang cukup memadai, Rimba Ukur memiliki banyak potensi sumber daya alam banyak dan sebagian besar belum banyak dimanfaatkan, kepenghuluan Rimba Ukur yang memiliki luas wilayah 1.215 Hektar dan penduduknya sebanyak 2.906 jiwa, dengan mata pencarian sebagai penduduknya petani kebun 479 KK dan buruh tani 172 KK. Penyebabnya ialah sebagian besar dari tanah yang dimiliki dimanfaatkan untuk bertani.

Ketidakmampuan sarana dan infrastuktur ekonomi dan menampung para warga yang telah lulus dari kelembagaan pendidikan di Desa Rimba Ukur

mengakibatkan banyaknya angka pengangguran. Berdasarkan data potensi Desa 2020 menunjukkan bahwa terdapat 66 keluarga yang dalam kondisi produktif akan tetapi tak kunjung mendapatkan pekerjaan yang tetap, serta terdapat 85 keluarga yang termasuk dalam kategori prasejahtera. Karena pemerintah desa mengetahui bahwa ternyata masih begitu banyak keluarga yang dalam keadaan tidak memiliki pekerjaan dengan demikian pemerintah desa Rimba Ukur yang berperan penting dalam sebuah daerah, berusaha untuk mengurangi kemungkinan keterpurukan serta berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, yang merupakan sebuah program yang memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian produktif dengan cara mengikut sertakan masyarakat di Desa Rimba Ukur sendiri untuk berikut serta dalam kegiatan. Di antaranya yaitu dalam kegiatan pembinaan serta koordinasi yang mengacu pada program pemerintahan, terlebih pemerintah di Desa Rimba Ukur dalam menerapkan program pemberdayaan masyarakat desa yang dimaksudkan sebagai sebuah usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pada sebuah desa maka pemerintah membuat sebuah program yang mana program ini semestinya mengarah pada meningkatnya kualitas serta kesejahteraan masyarakat di desa dengan menggunakan program pemberdayaan masyarakat yang ter maksud kan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya terlebih sebagai upaya untuk memperbaiki tingkah laku masyarakat agar tercapai tujuan tersebut, namun ternyata selama kegiatan perbaikan ini yaitu untuk mensejahterakan

masyarakat ditemukan bahwa masyarakat di Desa Rimba Ukur masih malas dan kurang berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga pemerintah Desa Rimba Ukur menghadapi berbagai macam kendala selama pelaksanaan program di Desa Rimba Ukur.

Kami menyadari bahwasannya pembangunan diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang mungkin ditemukan pada sebuah daerah, sebagai contoh kemiskinan, kesenjangan sosial, serta pengangguran. Akan tetapi pemahaman ini tidak boleh diabaikan begitu saja dengan tidak diberikan kritik atau pengelolaan, karena pada prinsipnya keberadaan pembangunan dapat dianggap sebagai satu-satunya upaya untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang dapat mengubah fakta, sebagai contoh yaitu terdapat perbedaan sosial, ekonomi, politik serta budaya. .

Hal ini membutuhkan partisipasi aktif dan serius dari otoritas lokal, baik pemerintah pusat atau daerah, otoritas sub-regional dan pedesaan, untuk ikut serta dalam pembangunan pedesaan dan memungkinkan masyarakat pedesaan untuk mengatasinya. Pemerintah juga semestinya memperhatikan semua kebijakan yang diambil dalam upaya penerapan ataupun pelaksanaannya, yang berbentuk peraturan perundang-undangan ataupun peraturan daerah yang ditetapkan atau akan di implementasikan.

Sementara itu, Terdapat berbagai macam usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat itu sendiri yaitu demi meningkatkannya kesejahteraan pada masyarakat beberapa kegiatan yang dapat mendukung kegiatan ini ialah peningkatan prakarsa dan juga swadaya

masyarakat, kegiatan untuk memperbaiki lingkungan serta perumahan berusaha untuk mengembangkan kegiatan ekonomi yang ada di desa mengembangkan sumber keuangan desa juga aktivitas lainnya yang bisa memperbaiki kapabilitas masyarakat untuk meningkatkan hasil produksi daripada apa yang mereka usahakan. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pemberdayaan Masyarakat ini adalah salah satu cara yang bisa dilaksanakan demi menerapkan kemandirian sosial ekonomi pada sebuah masyarakat dalam kurun waktu yang lama. Agenda ini menitikberatkan pada masyarakat perekonomian kelas bawah yang kepercayaannya secara ekonomi sosial, kebudayaan, serta politik dapat dikatakan tidak stabil.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 12, Bagian 12, pemberdayaan masyarakat pedesaan berarti melakukan upaya membangun kemandirian serta kesejahteraan masyarakat dengan melakukan perbaikan di bidang pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, dan pemanfaatan sumber daya dengan membuat kebijakan-kebijakan, program, kegiatan serta pendampingan yang sejalan dengan permasalahan serta mengutamakan pada hal-hal yang betul-betul dibutuhkan oleh penduduk Desa. Landasan tugas pemerintah desa diatur pada permendagri Nomor 48 tahun 2015 mengenai tata kerja pemerintah desa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 yang mempunyai tugas serta fungsi: pemerintah desa, pengembangan masyarakat, seperti realisasi hak dan tanggung jawab masyarakat, anggota masyarakat, hak sosial, budaya, agama dan tenaga kerja masyarakat, seperti sosialisasi dan stimulasi masyarakat di bidang ekonomi budaya, politik,

lingkungan, pemberdayaan keluarga, olahraga pemuda dan organisasi pemuda.

Dalam upaya pembangunan pemberdayaan Desa ini Tentunya terdapat beberapa dampak ataupun akibat bagi sektor pedesaan. Sebab dan akibat tersebut akhirnya dianggap oleh masyarakat sebagai sebuah permasalahan dan juga tantangan pembangunan perdesaan apalagi sekarang masyarakat sudah terjun ke dalam pasar bebas. Tantangan yang ditemukan pada saat upaya pembangunan tersebut tentunya berubah Seiring berjalannya waktu, dapat dibedakan berdasarkan jumlahnya ataupun cara pandang permasalahannya yang mana setiap tantangan tersebut tentunya harus ditemukan solusinya. Apabila masyarakat tidak berperan serta dalam upaya perbaikan ini maka upaya pemerintah akan menjadi sia-sia dan tiada artinya maka dari itu masyarakat dituntut untuk sadar dan mau berperan aktif dalam kegiatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut sebagai usaha untuk melakukan perbaikan mengenai sosial ekonomi di masyarakat karena ini merupakan permasalahan yang genting. Seperti yang dikatakan oleh Suryadi (1978) bahwa mekanisme pembangunan desa ialah sebuah Kerjasama yang terjalin antara pemerintah dan juga masyarakat dalam melakukan sebuah kegiatan di masyarakat tersebut. Pada beberapa kasus pemerintahannya melakukan monitoring saja masyarakat sendiri yang melakukan kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh pemerintah tersebut. Maka dalam kasus tersebut pemerintah hanya membimbing, mengarahkan, membantu dan mengawasi, mengkoordinasi supaya masyarakat dapat melakukan kegiatan tersebut secara maksimal agar tercapai kesejahteraan yang diinginkan.

Desa ditafsirkan sebagai sebuah Kesatuan masyarakat hukum yang berwenang dalam melakukan pengaturan serta kepengurusan demi kepentingan masyarakat sekitarnya sesuai dengan asal-usul serta adat istiadat yang ada di sekitarnya serta diakui pada sistem pemerintahan nasional yang berada di daerah kabupaten. Fungsi dari Desa ini yaitu sebagai ujung tombak pada sebuah pelaksanaan pembangunan di setiap bidang, baik berbasis pemerintahan, pembangunan ataupun tugas-tugas dalam membantu untuk berikut serta dalam mendukung pembangunan integral yang tentunya tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain yang terdiri dari kehidupan serta penghidupan masyarakat. Sebagai upaya untuk memperbaiki serta menghadapi permasalahan yang ada di masyarakat serta kondisi-kondisi yang tidak diinginkan maka harus dimulai dari sendiri. Pemberdayaan masyarakat ini dikatakan sebagai sebuah usaha pemerintah dalam upaya mentransformasikan perkembangan masyarakat yang digunakan sebagai kekuatan bagi masyarakat, melakukan perlindungan terhadap masyarakat serta sebagai upaya perjuangan untuk mempertahankan nilai-nilai serta kepentingan pada setiap aspek yang ada pada kehidupan bermasyarakat. Pemberdayaan masyarakat berarti upaya yang dilakukan untuk masyarakat demi memperbaiki kapabilitas serta kemandirian masyarakat. Pada hakikatnya usaha yang dapat dilakukan untuk menyumbangkan daya kekuatan ataupun kapabilitas kepada perseorangan dan juga kelompok masyarakat dibutuhkan untuk bisa membantu dalam mencapai usaha untuk memperbaiki potensi diri serta lingkungannya sehingga dapat mencapai kategori yang maksimal. Usaha yang dilakukan ini dibutuhkan

supaya masyarakat mampu untuk melakukan identifikasi, analisa, menentukan kebutuhan juga mampu untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada dengan menggunakan pemilihan alternatif solusi dengan Mandiri. Upaya pemerintah ini dapat dikatakan berhasil apabila telah terbentuk pemberdayaan masyarakat.

Upaya pemerintah dalam melakukan pemberdayaan masyarakat pada sebuah desa ini paling mudah dilakukan dan mudah untuk tercapainya tujuan tersebut yaitu dengan cara melibatkan masyarakat secara langsung serta unsur pemerintahan yang memanfaatkan kebijakan pembangunan yang lebih reaktif serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat menggunakan anggaran yang telah dialokasikan. Upaya pelaksanaan pembangunan desa ini dengan memberdayakan masyarakat ternyata menghasilkan output yang lebih efektif serta efisien daripada pembangunan desa dengan memanfaatkan tenaga proyek ataupun masyarakat yang tidak berasal dari desa tersebut. Upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menarik perhatian masyarakat agar mau berperan aktif dalam kegiatan pemberdayaan ini yaitu dengan melakukan pendekatan, pendekatan ini dilakukan dengan cara menstimulus masyarakat untuk dapat melakukan identifikasi mengenai hal-hal yang mereka inginkan serta mereka butuhkan untuk bekerja secara kooperatif sehingga muncullah rasa gotong royong serta tolong-menolong pada sesama warga desa tersebut.

Adanya pemerintahan desa berhubungan langsung dengan masyarakat sebagai kepala pemerintahan yang memimpin. Pemerintah desa merupakan posisi pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat sebagai yang

membina, mengayomi, serta melayani masyarakat untuk mendukung kemudahan partisipasi masyarakat. Pemerintahan Otonomi Pedesaan merupakan sub sistem penyelenggaraan sistem nasional, sehingga mempunyai kekuasaan untuk menangani segala yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat berarti bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa terus meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kebijakan, program dan kegiatan yang memperhatikan sifat masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat pedesaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam membentuk dan mengubah perilaku masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan kualitas hidup yang lebih baik. Pemberdayaan juga berupaya meningkatkan kapasitas dan potensi masyarakat agar masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya agar dapat bertahan dan berkembang secara mandiri dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya.

Dalam hal ini peneliti ingin melakukan riset terhadap Bagaimana peran pemerintah Desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa Rimba Ukur. Permasalahan ini mendapatkan dukungan dengan adanya data-data yang diperlukan, dan juga adanya Tempat penelitian yang terdapat di desa. Dalam hal ini desa tidak hanya berperan sebagai objek yang mendapatkan manfaat, akan tetapi juga menjadi subjek yang memberikan manfaat kepada warga masyarakat sekitarnya serta menjadi salah satu komponen desa agar terciptanya kebersamaan dan juga gerakan untuk mengembangkan aset yang ada pada

warga sekitar juga menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat. Di samping hal tersebut Desa juga dianggap mampu untuk memberikan penghasilan serta ketercukupan keperluan masyarakat sekitar diantaranya dari segi makanan, energi, pelayanan dan lain sebagainya yang menjadi cita-cita dalam kurun waktu yang lama, Desa sanggup untuk mengadakan lapangan pekerjaan dengan memberikan sumber-sumber pendapatan atau penghasilan untuk masyarakat dan juga dapat menghasilkan pendapatan asli desa dengan jumlah yang mencukupi.

Adapun Rumusan masalah yang menjadi titik fokus peneliti dalam melakukan penyusunan proposal ini yaitu “Bagaimana Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pelaksanaan Sektor Petani Karet di Desa Rimba Ukur, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin)?” Dan apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Rimba Ukur? Di samping hal tersebut. Peneliti memiliki tujuan lain yaitu untuk mengetahui tingkat keberdayaan masyarakat sebelum serta setelah penurunan harga karet pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi pokok rumusan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Peran pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Khususnya Kelompok Tani di Desa Rimba Ukur, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin?

2. Apa yang Menjadi Faktor Pendorong dan Penghambat Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Khususnya Kelompok Tani di Desa Rimba Ukur, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mendeskripsikan Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Khususnya Kelompok Tani di Desa Rimba Ukur.
- b. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Khususnya Kelompok Tani.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan dapat memberikan pandangan dan juga informasi lebih lanjut secara akademis dan juga menjadi bahan untuk membandingkan antara peneliti yang nya dengan pendidikan yang ada pada studi ini mengenai pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pada pemerintah desa.

- b. Manfaat praktis

1. Bagi peneliti

Memberikan tambahan Wawasan kepada peneliti agar dapat melakukan penelitian mengenai peningkatan pengetahuan dan juga pengalaman Secara nyata pada aspek pemberdayaan masyarakat pada pemerintahan desa.

2. Bagi Aparatur Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan bisa di pergunakan untuk memberikan masukan pada pejabat pemerintah desa untuk melakukan peningkatan terhadap kualitas kerja, dengan demikian terciptalah pemberdayaan masyarakat yang baik

3. Bagi Akademis, ialah menjadi persyaratan akademis guna menuntaskan studi Strata satu (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Merdeka Malang.